



**APSSAI Accounting Review (Oktober 2023)**

*Enterprise risk management* dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan di parlemen Indonesia.

Lestari, F., Mayangsari, S. (2023). *APSSAI Accounting Review*, 3(2), 176-197.

<https://doi.org/10.26418/apssai.v3i2.89>.

**Fitriyani Lestari**

*Universitas Trisakti, Indonesia*

**Sekar Mayangsari\***

*Universitas Trisakti, Indonesia*

*Received: 3 Oktober 2023*

*Revision: 23 Oktober 2023*

*Accepted: 25 Oktober 2023*

JEL Classification: M42, H83

DOI: 10.26418/apssai.v3i2.89

**ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DALAM MENCEGAH  
DAN MENDETEKSI KECURANGAN DI PARLEMEN  
INDONESIA**

**ABSTRACT** *Enterprise Risk Management (ERM) is one tool used to improve governance and internal control, which is expected to prevent and detect fraud. This study discusses the application of risk management through the five pillars of the COSO ERM Integrated Framework in the DPR, MPR, and DPD RI in preventing and detecting fraud. This research uses mixed methods by combining qualitative and quantitative research through surveys and regression tests with 75 questionnaires and interviews with respondents who are Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). According to the study's results, risk management, evaluation, and reporting significantly influence efforts to prevent fraud, and further research results also show that governance, strategy, risk management, and reporting significantly influence efforts to detect fraud. The results of this study indicate that, empirically, Enterprise Risk Management contributes to minimizing and identifying fraud in the DPR, MPR, and DPD RI.*

**Keywords:** *Enterprise risk management; Fraud; Internal audit.*

**ABSTRAK** *Enterprise Risk Management (ERM) merupakan salah satu tools yang digunakan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan pengendalian internal yang diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan. Penelitian ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko melalui lima pilar COSO ERM Integrated Framework di DPR, MPR dan DPD RI dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Penelitian ini menggunakan mixed method yaitu dengan gabungan penelitian kualitatif dan kuantitatif melalui survei dan uji regresi dengan 75 kuesioner dan wawancara dengan responden yang merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Menurut hasil penelitian manajemen risiko, evaluasi dan pelaporan memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan terjadinya kecurangan, lebih lanjut hasil penelitian juga menunjukkan bahwa governance, strategi, manajemen risiko dan pelaporan memiliki pengaruh signifikan dalam upaya mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara empiris Enterprise Risk Management memberikan kontribusi dalam meminimalkan dan mengidentifikasi kecurangan di DPR, MPR, dan DPD RI.*

**Kata kunci:** *Enterprise risk management; Internal audit; Kecurangan.*

*Corresponding author, email: [sekar\\_mayangsari@trisakti.ac.id](mailto:sekar_mayangsari@trisakti.ac.id)*

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti*

*Jalan Kyai Tapa No. 1, Rt.6/Rw.16, Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat 11440*

**Pendahuluan**

Kecurangan atau *fraud*, masih menjadi isu yang hangat dan menarik untuk dibahas terutama pada kasus-kasus yang terkait dengan masalah keuangan yang melibatkan instansi

pemerintahan baik Kementerian Negara maupun Lembaga khususnya Lembaga Politik di Indonesia. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mendefinisikan *fraud* (kecurangan) yaitu penggunaan suatu jabatan oleh seseorang untuk memperkaya dirinya melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan penggunaan aset atau sumber daya organisasi. Korupsi di Indonesia seperti halnya juga di beberapa negara lain, banyak berkorelasi dengan penyalahgunaan kekuasaan dari para pemegang kekuatan politik. Watak kekuasaan pada dasarnya berambisi untuk memperbesar pengaruh, memperluas jangkauan dan cengkeramannya terhadap rakyat yang seringkali tidak memiliki kekuatan kontrol yang signifikan terhadap kekuasaan yang selalu merambat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat maupun daerah merupakan representasi dari rakyat pemilihnya, sehingga akan memengaruhi kepercayaan konstituennya jika para wakil yang dipilihnya terlibat korupsi. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui bahwa, Indeks Integritas DPR RI masih di level “waspada” dengan skor 77.4 pada tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena beberapa dimensi seperti pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), pengelolaan anggaran, transparansi dan keadilan layanan yang rendah serta keberadaan suap, gratifikasi, penyalahgunaan fasilitas kantor, dan risiko jual beli jabatan yang masih tinggi.

Seringkali kecurangan terjadi karena internal kontrol kurang dirancang dengan baik dan lemahnya tata kelola yang merusak proses organisasi. Organisasi sudah seharusnya memiliki prosedur pengendalian internal yang kuat untuk membatasi risiko. Banyak upaya untuk mencegah praktik kecurangan yang telah dilakukan, dengan harapan praktik kecurangan dapat diantisipasi sedini mungkin. Salah satunya adalah mencegah kecurangan dengan menerapkan manajemen risiko, yang menggambarkan bahwa risiko adalah suatu konsep yang menggambarkan suatu ketidakpastian, atau suatu kejadian atas kondisi yang berkaitan dengan hambatan dalam mencapai tujuan (Susilo & Victor, 2019).

Terkait dengan manajemen risiko, *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commisions (COSO)* mengembangkan *control framework* yang disebut *Enterprise Risk Management (ERM) Integrated Framework*. COSO menekankan bahwa risiko harus dikelola oleh seluruh pihak di dalam organisasi dan harus sesuai dengan tujuan organisasi. *Enterprise Risk Management (ERM) Integrated Framework* yang dikembangkan oleh COSO adalah salah satu model *risk-based auditing* yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan menilai risiko (Curtis & Carey, 2012).

COSO menyusun model pengendalian internal yang handal beserta risiko dan tata kelola organisasi. Setiap tahunnya COSO terus melakukan pembaharuan dan pembaharuan yang terbaru terjadi pada tahun 2017 dengan diterbitkannya *COSO ERM Integrated Framework*. Pada pembaharuan yang terbaru ini, *framework* tersebut mengembangkan lebih lanjut pada pengendalian internal dengan memberikan perhatian utama pada subjek ERM yang lebih luas, oleh karena itu, dengan penerapan *COSO ERM Integrated Framework* memberikan harapan baru bagi organisasi untuk lebih meningkatkan kehandalan pengendalian internalnya sehingga produktivitas dan profitabilitas organisasi meningkat.

Lima pilar ERM berdasarkan COSO (2013) yaitu *control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring* secara signifikan mempengaruhi upaya dalam pencegahan penipuan dan juga dapat digunakan dalam upaya deteksi kecurangan di Pemerintahan Jawa Barat (Tarjo *et al.*, 2022). Sistem pengendalian intern sesuai dengan kerangka kerja COSO berpengaruh positif untuk menghindari kesalahan dan kecurangan (Debora, 2022). Audit internal, bersama dengan sistem pengendalian internal, khususnya lingkungan pengendalian yang diartikulasikan dengan baik, mempengaruhi kualitas dan keakuratan informasi yang disampaikan kepada publik dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian lain juga menjelaskan bahwa kerangka COSO 2004, perannya juga sangat luas dalam memantau dan mendeteksi tidak hanya risiko operasi dan penipuan tetapi juga strategis risiko perusahaan afiliasi (Kim, 2017).

Manajemen risiko perusahaan juga merupakan alat untuk mencegah penipuan (Ayagre *et al.*, 2014; Rahman & Al Dhaimesh, 2018; Venter, 2007). Umumnya penelitian sebelumnya berfokus pada perusahaan keuangan yaitu asuransi (Hoyt & Liebenberg, 2011; McShane *et al.*, 2011; Nguyen & Vo, 2020). Namun, masih sedikit pembahasan *Enterprises Risk Management* di organisasi pemerintah Organisasi pemerintah (lembaga politik) tentunya sangat berbeda dengan perusahaan listing atau keuangan yang selama ini menjadi objek *Enterprises Risk Management*. Padahal menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terjadi potensi kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi yang mengalami peningkatan. Menurut ICW dalam semester I tahun 2022, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dengan potensi korupsi mencapai mencapai Rp 33.665 triliun yang Sebagian besar terjadi di pemerintahan pusat maupun daerah. Korupsi di Indonesia seperti halnya juga di beberapa negara lain, banyak berkorelasi dengan penyalahgunaan kekuasaan dari para pemegang kekuatan politik. Praktik korupsi di

lembaga politik itu muncul dalam berbagai corak dan variasinya karena terkait dengan jenis dan tingkat penyalahgunaan wewenang, kesempatan, dan sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan penguasa politik. Hal tersebut seringkali terjadi karena kontrol kurang dirancang dengan baik dan lemahnya tata kelola yang merusak proses organisasi.

Dalam penelitian ini manajemen risiko menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh instansi, tidak terkecuali bagi instansi pemerintah. Dalam instansi pemerintah manajemen risiko disinggung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang merupakan adopsi dari COSO *Internal Control Framework* dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia. Mengapa diklaim mengadopsi karena dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, aspek-aspek seperti *control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring* merupakan dimensi yang tepat dalam *Enterprises Risk Management Committee of Sponsoring Organization (COSO)*. Namun, *Enterprises Risk Management* masih belum diterapkan secara optimal di Instansi Pemerintahan Indonesia.

Melalui penerapan manajemen risiko auditor internal dapat berperan dalam membantu manajemen dengan melakukan deteksi dan investigasi kecurangan di saat yang sama menentukan apakah organisasi memiliki kontrol internal yang memadai. Peran audit internal termasuk mendeteksi, mencegah, dan memantau risiko kecurangan dan mengatasi risiko tersebut melalui audit dan investigasi. Internal audit harus mempertimbangkan dimana ada risiko kecurangan dalam suatu organisasi dan merespons secara tepat dengan melakukan audit atas kontrol di area tersebut, mengevaluasi potensi timbulnya kecurangan dan bagaimana organisasi mengelola risiko kecurangan tersebut (Standar 2120.A2) melalui penilaian risiko, dan perencanaan audit.

### **Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis**

**Kecurangan (*Fraud*)** *The Institute of Internal Auditor (IIA)* suatu organisasi auditor internal di Amerika Serikat, mendefinisikan kecurangan (*fraud*) adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Artinya adalah bahwa *fraud* merupakan kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi (Karyono, 2013).

*Fraud* menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016) merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. *Fraud* yang terjadi di sektor lembaga pemerintahan telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. *Fraud* yang terjadi di sektor publik seperti penyuapan, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan aset negara, hingga pemerasan merupakan tindakan kriminal yang bersifat luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kasus korupsi yang terjadi dalam berbagai bentuk di sektor pemerintah telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar dan benar-benar merugikan masyarakat. Situasi ini menjadikan tindakan korupsi menjadi sorotan yang hampir tidak bisa lepas dari berbagai persoalan di negeri ini. Dengan demikian, diperlukan sistem tertentu agar dapat memberantas korupsi. Perlu diketahui alasan-alasan dan faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan fraud atau korupsi.

Menurut ACFE, karakteristik utama dari kecurangan pekerjaan adalah (1) terselubung, (2) melanggar tanggung jawab fidusia karyawan terhadap organisasi, (3) berkomitmen dengan maksud memberikan keuntungan finansial yang cukup besar kepada karyawan, dan (4) melibatkan aset, pendapatan, atau cadangan organisasi tempatnya bekerja. ACFE mengklasifikasikan penipuan menjadi tiga kategori yaitu *Fraud Terhadap Aset (Asset Misappropriation)*, *Fraud Terhadap Laporan Keuangan (Fraudulent Statements)*, dan *Korupsi (Corruption)*. Korupsi adalah kerugian yang paling penting dalam penelitian ini. Selain itu, Donald Cressey menciptakan sebuah hipotesis yang dikenal sebagai *Fraud Triangle*. Kemudian berkembang menjadi *fraud diamond* yang dikemukakan oleh Wolfe and Hermanson tahun 2004, dimanadalam teori ini menambahkan satu elemen kualitatif yaitu kapabilitas (*capability*). Dan disempurnakan oleh Crowe (2011) yang menemukan terdapat lima "*fraud risk factor* yaitu: tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*), dan arogansi (*arrogance*)".

**Manajemen Risiko** Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai "*risk management is a rational attempt to reduce or avoid the consequences of loss or injury*" (William *et al.*, 1998). Sedangkan CIMA dalam Collier *et al.* (2007) mendefinisikan manajemen risiko sebagai "*Process of understanding and managing the risk that organizationis inevitability subject to attempting to achieve its corporate objectives*". Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko sangat penting dilakukan dengan tujuan untuk mereduksi potensi kerugian dan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen risiko adalah upaya untuk secara sistematis menerapkan kebijakan regulasi dan upaya manajemen praktis dalam menganalisis penggunaan dan pengendalian risiko untuk melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan (Sangari, 2011; Sepang *et al.*, 2013; Umimper *et al.*, 2015). Manajemen risiko mampu mengurangi kemungkinan peluang karyawan untuk melakukan kecurangan bahkan perilaku kejahatan keuangan karena tindakan tersebut dapat mengidentifikasi dan menutup celah dan kelemahan dalam struktur pengendalian internal (Kassem & Andrew, 2012).

Manajemen risiko menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh instansi pemerintahan baik Kementerian maupun Lembaga, tidak terkecuali bagi instansi pemerintah. Dalam instansi pemerintah manajemen risiko disinggung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 13 sampai dengan pasal 17, yang merupakan adopsi dari COSO *Internal Control Framework* dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia. Aspek-aspek manajemen risiko seperti *control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring* merupakan dimensi yang tepat dalam *Enterprises Risk Management Committee of Sponsoring Organization* (COSO). Namun, *Enterprises Risk Management* masih belum diterapkan secara optimal di Instansi Pemerintahan Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut, memiliki makna tidak langsung yang menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko wajib dilakukan pada pemerintah pusat maupun daerah.

*Enterprise Risk Management* memainkan peran penting dalam mencegah dan mengendalikan risiko internal dalam hal pengendalian internal yang dapat digunakan untuk mencegah dan mengidentifikasi kecurangan. Dengan adanya integrasi pemanfaatan framework ini dalam manajemen risiko organisasi, diharapkan tindakan kecurangan yang terjadi di organisasi dapat dicegah secara dini sebelum timbul tindakan kecurangan derivatifnya, atau bila sudah terjadi dan mempunyai dampak yang signifikan maka dapat dilakukan penindakan secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

***Enterprise Risk Management Integrated Framework - Integrating Strategy and Performance*** COSO 2004 telah berkembang dan diperbaharui pada tahun 2017 dengan tagline yang lebih luas yaitu *ERM Integrating with Strategy and Performance*. Strategi dan kinerja menjadi fokus dalam penerapan manajemen risiko. COSO 2017 merevisi kerangka sebelumnya dengan memudahkan keterhubungan risiko dengan target dan kinerja.



Pedoman kerangka COSO telah mengalami perkembangan secara komprehensif untuk membantu perusahaan dalam beroperasi, khususnya di era digitalisasi yang menuntut organisasi untuk mampu memiliki berbagai pilihan strategi alternatif dengan terus mengadaptasinya secara berkala (Pamungkas, 2019). Pada COSO ERM 2017 yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (2017) memiliki 5 komponen dasar yang didukung oleh 20 prinsip ERM untuk membantu pemimpin organisasi dalam menganalisis dan mengelola suatu risiko menjadi potensi yang handal untuk meningkatkan performa perusahaan seterusnya, yang terdiri dari *governance and culture, strategy and objective-setting, performance, review and revision, and information, communication, and reporting*.

Kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM) digunakan dalam proses untuk menentukan dan mengidentifikasi strategi organisasi yang cocok untuk diterapkan dengan memperhatikan berbagai faktor risikonya. Selanjutnya, risiko yang telah teridentifikasi tersebut dikelola dan dimitigasi sehingga tujuan organisasi dapat dijamin pencapaiannya. Selain itu sistem pengendalian intern dalam kerangka ERM juga berpengaruh positif untuk menghindari kesalahan dan kecurangan (Debora, 2022). Namun sebaliknya kelemahan pengendalian internal dalam kerangka ERM menyebabkan terjadinya kecurangan (Lokanan 2014; Skaife, Veenman & Wangerin 2013), menyebabkan kecenderungan peningkatan kerugian kredit (Cho & Chung 2016), penurunan penjualan (Su, Zhao & Zhou 2014 ), mengurangi etika kerja masa depan (Weiss, 2014), meningkatkan asosiasi yang menciptakan manfaat yang lebih tinggi dari kontrol individu (Gong, Ke & Yu 2013), mengurangi nilai pasar perusahaan dan relevansi nilai informasi akuntansi (Hu *et al.* 2013), membuat laporan keuangan berkualitas rendah (Ghosh & Lee 2013), menyebabkan pinjaman lebih tinggi, hilangnya cadangan dan ketentuan di perusahaan perbankan (Cho & Chung 2016), dan memicu respons negatif pasar (Nishizaki, Takano & Takeda 2014).

Rahman & Anwar (2014) berpendapat bahwa dalam suatu perusahaan khususnya bank maupun organisasi tidak harus bergantung pada satu metode untuk menyelesaikan penipuan, organisasi seharusnya membangun *checks and balances* untuk mengidentifikasi kesalahan dalam sistem pengendalian internal dan untuk meningkatkan metode yang lebih efektif untuk mencegah dan mendeteksi penipuan secara eksplisit, menunjukkan proses identifikasi dan mitigasi risiko perusahaan merupakan elemen penting dalam mencapai kinerja kerja yang baik dan target profitabilitas untuk mencegah hilangnya sumber daya (COSO 1992). Hal yang harus digarisbawahi dalam pendapat Rahman & Anwar (2014) yaitu

bahwa ERM ini tidak hanya menciptakan strategi perusahaan melainkan hanya memberitahu mengenai risiko-risiko yang berhubungan dengan strategi yang dipertimbangkan dengan adopsi strateginya. Organisasi harus mengevaluasi bagaimana strategi yang dipilih dapat mempengaruhi profil risiko-risiko perusahaan khususnya atas profil tipe dan jumlah risiko organisasi yang dapat diekspos untuk dilakukan *checks and balance* dalam mengidentifikasi kesalahan dan penipuan.

Ketika mengevaluasi risiko-risiko potensial yang timbul dari strategi, pihak Manajemen juga perlu mempertimbangkan asumsi kritis yang telah dibuat dari pilihan strategi yang telah ditetapkannya. Selain itu, organisasi juga dapat mempertimbangkan berbagai risiko yang timbul dari strategi yang dipilih tersebut. ERM memberikan pandangan yang berharga bagaimana perubahan sensitif atas asumsi mempunyai pengaruh sedikit atau bahkan pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

### **Pengembangan Hipotesis**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah penerapan ERM di lembaga parlemen pemerintah yaitu DPR, MPR dan DPD RI dapat digunakan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan di lembaga parlemen tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu yang banyak berfokus pada perbankan dan perusahaan swasta dalam mengkaji penerapan *Enterprises Risk Management*, penelitian ini menggunakan *Enterprises Risk Management* - kerangka pengendalian internal, yang meliputi unsur-unsur berikut: *Governance and Culture, Strategy and Objective-Setting, Performance, Review and Revision, and Information, Communication, and Reporting* (COSO, 2017). Pencegahan kecurangan dalam penelitian ini mengacu pada kegiatan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu memastikan dewan komisaris, manajemen, dan personel lain dari lembaga tersebut dapat memberikan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas, dan efisiensi operasional perusahaan maupun organisasi (COSO, 2017). Sebaliknya, deteksi penipuan adalah kegiatan untuk menemukan serangkaian tanda bahaya atau gejala untuk memberikan informasi dan peringatan dini kepada pemangku kepentingan.

Manajemen risiko perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan risiko keuangan atau kepatuhan dan berfokus pada bahaya yang mungkin muncul. Manajemen risiko perusahaan memainkan peran penting dalam mencegah dan mengendalikan risiko internal dalam hal pengendalian internal. Tujuan memasang sistem pengendalian internal di *Enterprises Risk Management* adalah untuk mengidentifikasi fraud yang dapat merusak tujuan organisasi (COSO 2017).



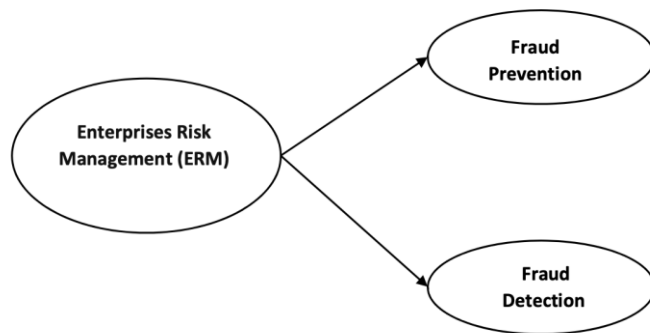
Selain itu, *Enterprises Risk Management* juga menyatakan bahwa pemisahan antara komite risiko dan komite audit dapat memperkuat pengendalian, pencegahan, dan deteksi terkait kecurangan perusahaan (Abdullah & Said, 2019). Pemisahan antara kedua komite ini merupakan salah satu cara efektif dalam mekanisme *good governance* untuk mencegah terjadinya *fraud* di organisasi. Sementara itu, *Enterprises Risk Management* digunakan di sektor perbankan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan mengurangi bahaya pelaporan keuangan yang tidak benar (Rahman & Al-Dhaimesh, 2018). Studi ini juga menunjukkan bahwa manajemen senior sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal. Alazabi *et al.* (2020) menguji pengaruh komitmen manajemen puncak dan manajemen risiko terhadap upaya audit internal dan pencegahan kecurangan.

Lima pilar ERM berdasarkan COSO (2013) yaitu *control environment, risk assessment, control activities, information and communication*, dan *monitoring* secara signifikan mempengaruhi upaya dalam pencegahan penipuan dan juga dapat digunakan dalam upaya deteksi kecurangan di Pemerintahan Jawa Barat (Tarjo *et al.*, 2022). Sistem pengendalian intern sesuai dengan kerangka kerja COSO berpengaruh positif untuk menghindari kesalahan dan kecurangan (Debora, 2022). Dalam penelitian lain juga menjelaskan bahwa kerangka COSO 2004, perannya juga sangat luas dalam memantau dan mendeteksi tidak hanya risiko operasi dan penipuan tetapi juga strategis risiko perusahaan afiliasi (Kim, 2017).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Lima pilar ERM harus dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan atau *fraud* dalam internal organisasi untuk menciptakan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: *Governance* berpengaruh signifikan dalam mencegah kecurangan.
- H<sub>2</sub>: Strategi berpengaruh signifikan dalam mencegah kecurangan.
- H<sub>3</sub>: Manajemen risiko berpengaruh signifikan dalam mencegah kecurangan.
- H<sub>4</sub>: Evaluasi berpengaruh signifikan dalam mencegah kecurangan.
- H<sub>5</sub>: Pelaporan berpengaruh signifikan dalam mencegah kecurangan.
- H<sub>6</sub>: *Governance* berpengaruh signifikan dalam mendeteksi kecurangan.
- H<sub>7</sub>: Strategi berpengaruh signifikan dalam mendeteksi kecurangan.
- H<sub>8</sub>: Manajemen risiko berpengaruh signifikan dalam mendeteksi kecurangan.
- H<sub>9</sub>: Evaluasi berpengaruh signifikan dalam mendeteksi kecurangan.
- H<sub>10</sub>: Pelaporan berpengaruh signifikan dalam mendeteksi kecurangan.

Gambar 1 mengilustrasikan hubungan antar variabel dependen dan independen yang dikembangkan dalam penelitian ini.



### **Gambar 1. Kerangka Penelitian**

#### **Metode Penelitian**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kombinasi atau *mixed method* yaitu pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan dan mengkombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian).

Dalam penelitian ini menggunakan *the explanatory sequential design* yang merupakan cara pengumpulan data yang diawali dengan pengumpulan data kuantitatif kemudian dilanjutkan pengumpulan data kualitatif untuk membantu menganalisis data. Pada tahap awal penelitian ini akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Tujuan langkah ini adalah untuk mengumpulkan data dan mengidentifikasi informan untuk tahap selanjutnya.

Pada tahap kedua teknik kualitatif akan digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara untuk menentukan bagaimana manajemen risiko perusahaan dapat mencegah dan mengidentifikasi penipuan. Teknik kuantitatif akan memberikan gambaran secara luas mengenai tema penelitian. Kemudian berdasarkan teknik kuantitatif tersebut akan dilakukan analisis secara kualitatif dan dilakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan perspektif responden atas tema penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan persepsi Aparatur Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) di lingkup Lembaga Parlemen Indonesia yaitu Inspektorat Utama Setjen DPR, Inspektorat Setjen MPR dan Inspektorat Setjen DPD RI. Tujuan utama APIP adalah untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan aktivitasnya, serta meningkatkan standar tata kelola instansi pemerintah. APIP dianggap sebagai responden

yang tepat untuk penelitian ini. Responden diminta untuk melengkapi kuesioner tentang manajemen risiko dari masing-masing instansi sebagai upaya pencegahan dan deteksi penipuan (Tabel 1).

Responden diminta untuk melengkapi kuesioner tentang implementasi ERM serta pencegahan dan deteksi penipuan (Tabel 1). Sebanyak 88 survei yang dikeluarkan, dengan tingkat respons 89 persen yang mana 9 responden tidak mengisi, dan 4 data *outlier*, sehingga sampel akhir penelitian ini berjumlah 75 responden. Sampel penelitian lebih dari 30 dan kurang dari 500 dianggap cukup untuk penelitian secara umum (Sekaran & Bougie, 2016:264).

**Tabel 1. Data Responden**

N o	Instansi Responden	Jumlah Responden	Distribusi Kuesioner	Kuesioner Kembali	Tingkat Respon	Kuesioner Outlier	Kuesioner Digunakan
1.	Inspektorat Setjen DPR RI	59	59	59	100%	1	58
2.	Inspektorat Setjen MPR RI	17	17	10	59%	2	8
3.	Inspektorat Setjen DPD RI	12	12	10	83%	1	9
	Jumlah	88	88	79	89%	4	75

Sumber: Dikembangkan Peneliti (2022)

Pada bagian survei, data tentang biografi responden seperti jabatan, jenis kelamin, pendidikan terakhir, usia, dan masa kerja. Kemudian variabel independen *Enterprises Risk Management* diukur dengan 27 item pertanyaan yang terdiri dari lima dimensi pengendalian internal dalam *Fraud Management* yaitu *Governance and Culture, Strategy and Objective Setting, Performance, Review and Revision, and Information, Communication and Reporting* (COSO, 2017). Sementara itu, pencegahan kecurangan (*Prevent*) diukur dengan 7 item pertanyaan, dan deteksi penipuan (*Detection*) diukur dengan 6 item pertanyaan yang diadopsi dari Survey Nasional Audit Internal 2022 yang diadakan oleh *The Institute of Internal Auditors (The IIA) Indonesia* bersama dengan *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter* dan Universitas Kristen Petra untuk memahami profil, peran dan praktik-praktik Audit di Indonesia khususnya dalam *area fraud management* dengan modifikasi. Di akhir survei, akan dilakukan wawancara dengan responden untuk menanggapi segala sesuatu yang berkaitan dengan ERM, pencegahan dan deteksi penipuan

di instansi parlemen. Semua variabel diukur dengan lima skala Likert (1 = sangat tidak setuju dan 4 = sangat setuju).

Variabel independen adalah *Enterprise Risk Management* (ERM), dan variabel dependen adalah pencegahan dan deteksi kecurangan (*fraud*). Teknik analisis untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi dan model penelitian sebagai berikut:

$$\text{Enterprise Risk Management} = \beta_0 + \beta_1 \text{ Fraud Prevention} + \varepsilon$$

$$\text{Enterprise Risk Management} = \beta_0 + \beta_1 \text{ Fraud Detection} + \varepsilon$$

Keterangan:

$\beta_0$  = konstanta

$\beta_1$  = koefisien

$\varepsilon$  = error

### Hasil dan Pembahasan

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengevaluasi keabsahan data penelitian dengan melihat pada nilai Croncach's Alpha.

**Tabel 2. Uji Realiabilitas**

No	Variabel	Item	Croncach's Alpha
1.	<i>Governance</i>	6	0.808
2.	Strategi	5	0.883
3.	Manajemen risiko	6	0.819
4.	Evaluasi	6	0.832
5.	Pelaporan	4	0.847
6.	Pencegahan kecurangan	7	0.868
7.	Deteksi kecurangan	6	0.834

Sumber: Data Diolah (2022)

Tabel 2 menunjukkan nilai reliabilitas dari 40 item pernyataan yang digunakan sebagai survei penelitian untuk mengukur tujuh variabel manajemen risiko organisasi dan mencegah serta mendeteksi penipuan di organisasi pemerintah. Reliabilitas diukur dengan menggunakan *Cronbach's alpha*. Instrumen penelitian valid jika *Cronbach's alpha* di atas 0.70 (Cho & Kim, 2015). Koefisien cronbach alpha dari tujuh variabel yang diuji dalam penelitian ini menunjukkan hasil di atas 0.70. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap item yang ditetapkan dalam penelitian ini reliabel dan konsisten.

Berdasarkan uji statistik deskriptif diketahui bahwa, dengan mengacu pada nilai rata-rata variabel *governance*, strategi, manajemen risiko, evaluasi, dan pelaporan menunjukkan

persepsi responden menggambarkan bahwa DPR, MPR dan DPD RI dapat menerapkan *Enterprise Risk Management* secara efektif. Nilai rata-rata yang tinggi menegaskan pernyataan tersebut. Namun hasil pemantauan lebih lanjut menunjukkan nilai rata-rata di bawah 20 yang menggambarkan bahwa responden cenderung ragu-ragu dalam menerapkan *Enterprise Risk Management* yang diukur dengan variabel strategi. Sedangkan untuk pencegahan menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa responden setuju untuk menerapkan tindakan pencegahan penipuan di lingkungan DPR, MPR dan DPR RI. Selanjutnya, nilai rata-rata variabel deteksi juga tinggi, yang mana sama dengan variabel pencegahan. Oleh karena itu, penerapan ERM perlu dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan di DPR, MPR dan DPD RI.

**Tabel 3. Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Governance	75	18.00	24.00	21.4400	2.25556
Strategi	75	16.00	20.00	19.0000	1.18550
Manajemen risiko	75	18.00	24.00	21.6533	2.09564
Evaluasi	75	18.00	24.00	21.8400	2.23631
Pelaporan	75	21.00	28.00	24.8133	2.06446
Pencegahan kecurangan	75	18.00	28.00	22.5200	3.11648
Pendeteksian kecurangan	75	18.00	24.00	21.0933	2.23107

Sumber: Data Diolah (2022)

**Upaya Pencegahan Kecurangan** Pada Tabel 5 hasil uji regresi menampilkan bahwa lima pilar ERM dalam pengujian variabel terhadap upaya pencegahan di lingkungan DPR, MPR dan DPD RI berpengaruh signifikan pada variabel manajemen risiko, evaluasi dan pelaporan terhadap upaya pencegahan kecurangan. Sedangkan pada variabel *governance* dan strategi memiliki t hitung lebih kecil yaitu sebesar 0.316 untuk *governance* dan 0.200 untuk strategi jika dibandingkan dengan t tabel sebesar 1.666 selain itu juga variabel *governance* dan strategi memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari 0.05 yang berarti variabel tidak signifikan. Oleh karena itu analisis hipotesis menunjukkan bahwa H<sub>1</sub> dan H<sub>2</sub> tidak dapat diterima yang mana hasilnya menunjukkan bahwa tidak seluruh pilar ERM dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah terjadinya kecurangan di DPR, MPR dan DPD RI.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko memiliki nilai t hitung paling besar (t=2.834) jika dibandingkan dengan variabel lain yang berarti H<sub>3</sub> diterima. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa manajemen risiko memiliki

**Tabel 4. Uji Regresi Pencegahan Kecurangan**

Variabel	Koefisien	t	Sig.	Kesimpulan
Konstanta	.757	.123	.902	
<i>Governance</i>	.109	.316	.753	H <sub>1</sub> ditolak
Strategi	-.054	-.200	.842	H <sub>2</sub> ditolak
Manajemen risiko	1.004	2.834	.006	H <sub>3</sub> diterima
Evaluasi	-.553	-2.256	.027	H <sub>4</sub> diterima
Pelaporan	.435	2.428	.018	H <sub>5</sub> diterima

Sumber: Data Diolah (2022)

pengaruh yang signifikan dalam upaya pencegahan kecurangan di DPR, MPR dan DPD RI. Hasil ini juga membuktikan bahwa responden menganggap manajemen risiko sebagai komponen ERM yang paling penting dalam pencegahan kecurangan atau *fraud*. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Tarjo *et al.* (2022) yang menyebutkan bahwa:

*“Manajemen Risiko memiliki peran dalam penilaian risiko yang ada di pemerintah daerah yang mana menunjukkan bahwa pemerintah daerah setuju untuk melihat penilaian risiko apakah risiko yang dihadapi akan menghambat tujuan organisasi dan pencegahan kecurangan”*

COSO juga mengatakan penilaian risiko merupakan kunci penting untuk tata kelola perusahaan yang efektif. Pengendalian intern harus fleksibel menghadapi perubahan terkait risiko yang dihadapi organisasi. Dengan cara ini, DPR, MPR, dan DPR RI dapat lebih memperkuat upaya mereka dalam mencegah kecurangan.

Pada variabel evaluasi dan pelaporan terhadap pencegahan kecurangan juga memiliki hasil signifikan dengan t hitung sebesar 2.256 untuk variabel evaluasi dan 2.428 untuk variabel pelaporan yang mana H<sub>4</sub> dan H<sub>5</sub> diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan tindak lanjut serta pelaporan dan penyampaian informasi memiliki pengaruh dalam upaya pencegahan kecurangan di DPR, MPR dan DPD RI.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fabio (2019) tentang *“The Importance of Enterprise Risk Management in Large Companies in Colombia”*, yang menyatakan bahwa evaluasi dan pemantauan risiko memiliki hubungan yang positif dalam pengambilan keputusan perbaikan manajemen dalam rangka tindakan pengendalian untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dan mencegah kerugian dan kecurangan yang memengaruhi nilai pasar. Penelitian tersebut juga menerangkan bahwa 63.5 persen perusahaan besar di Kolombia memiliki sistem manajemen risiko canggih yang menerapkan



langkah-langkah pengendalian untuk risiko yang dievaluasi dalam organisasi mereka. Selain itu, 66.7 persen menggunakan register peristiwa risiko untuk meningkatkan manajemen mereka, mengevaluasi semua risiko yang teridentifikasi dan terkualifikasi.

Pada penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa hasil pemantauan dan evaluasi kemudian dilaporkan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terlibat yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Ditegaskan bahwa menurut hasil penelitian Fabio (2019), sebanyak 89.9 persen perusahaan besar di Kolombia memiliki persepsi bahwa keputusan utama manajemen risiko bergantung pada manajemen senior yang memiliki komitmen efektif terhadap manajemen risiko. Demikian pula, sebanyak 69.7 persen dari perusahaan tersebut menggunakan hasil pemantauan risiko untuk membuat keputusan dan mengkomunikasikan hasil dan panduan manajemen risiko kepada pihak-pihak yang terlibat. komunikasi dan pelaporan antara pihak-pihak yang terlibat dan komitmen manajemen senior sangat penting untuk membangun saluran komunikasi yang jelas dan melaksanakan komitmen yang efektif oleh manajer risiko dalam organisasi.

Penerapan *Enterprises Risk Management* juga dapat meningkatkan nilai organisasi (Yudianto *et al.*, 2021). Temuan kami juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya pengendalian internal dan manajemen risiko yang kuat di lingkungan pengendalian dan komponen pemantauan (Ayagre *et al.*, 2014). Temuan lain adalah bahwa kesadaran yang lebih besar terhadap lingkungan pengendalian dan komponen pemantauan sistem pengendalian internal akan memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas sistem secara keseluruhan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa APIP, sebagai auditor internal di DPR, MPR dan DPD RI, telah melakukan pemantauan dan pencegahan kecurangan dengan sangat baik. Pemantauan memastikan *Enterprise Risk Management* dapat berjalan efektif dalam suatu organisasi.

Venter (2007) dalam penelitian Tarjo (2022) menyatakan bahwa organisasi dapat mencegah penipuan dengan lebih baik jika mereka secara aktif mengevaluasi dan menilai risiko dan kelemahan mereka terhadap penipuan. Pemantauan secara berkala harus dilakukan untuk memastikan penilaian. Penilaian risiko selalu mengidentifikasi risiko yang dihadapi organisasi baik secara internal maupun eksternal. Dengan cara ini, DPR, MPR dan DPD RI dapat lebih memperkuat upaya mereka dalam mencegah penipuan. Selain itu, pemantauan melalui audit internal dapat meningkatkan pencegahan kecurangan dalam organisasi (Alazzabi *et al.*, 2020). Informasi dan komunikasi, serta pemantauan, merupakan komponen penting dari pengendalian internal yang efisien.

Strategi perencanaan dan penetapan sasaran merupakan upaya dalam menetapkan tujuan organisasi, melakukan analisis bisnis, menentukan *risk appetite*, membuat alternatif strategi. Melakukan evaluasi dan menentukan tujuan organisasi merupakan lingkup dari pilar Strategi dalam ERM. Pada misi dan visi yang ditetapkan oleh organisasi memberikan pandangan atas tipe dan jumlah risiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Keduanya dapat membantu organisasi untuk membangun batasan - batasan dan fokus bagaimana suatu keputusan yang diambil mempengaruhi strategi perusahaan.

Oleh karena itu, dengan diterapkannya ERM yang berbasis Integrated Framework maka perusahaan dapat menyelaraskan kebijakan dan strategi perusahaan dengan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) yang telah ditetapkan oleh manajemen, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan terhadap berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Selain itu, dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai risiko dan meminimalisir kerugian yang ditimbulkan atas berbagai risiko tersebut (Soegeng, 2018).

Hasil penelitian ini tidak signifikan ( $t=0.200$ ) atau  $H_2$  ditolak atau tidak sejalan dengan penelitian Soegeng (2018) dan Salifou, (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan penerapan COSO ERM Model dalam hal strategi organisasi, keunggulan kompetitif, dan peningkatan nilai. Beberapa responden penelitian juga memiliki masalah yang sama terkait dengan penerapan strategi organisasi yang belum berjalan secara efektif. Responden menyatakan sebagai berikut:

*"Dalam penerapan manajemen risiko untuk menciptakan good governance, diperlukan komitmen pimpinan secara formal dalam menerapkan strategi dan kebijakan terkait dengan manajemen risiko"*

Responden lain juga mengatakan bahwa:

*"Belum dilakukan penentuan risk appetite dalam rangka mempertimbangkan strategi manajemen risiko di level pimpinan"*

Responden juga mengatakan"

*"Dalam pengambilan keputusan dan penentuan perencanaan strategi organisasi belum berdasarkan pertimbangan manajemen risiko"*

Sebagian besar responden mengatakan bahwa memang diperlukan perhatian khusus terkait dengan komitmen pimpinan dalam menerapkan manajemen risiko dalam menentukan strategi organisasi dan pengambilan keputusan berbasis risiko. Hal tersebut juga berpengaruh atas tingkat maturitas manajemen risiko di lingkup DPR, MPR dan DPD RI yang masih rendah berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Lebih lanjut, pada variabel *governance* atau tata kelola tidak memiliki nilai probabilitas yang signifikan yaitu 0.753 atau  $t=0.316$  yang mana  $H_1$  ditolak. Hasil penelitian tidak sejalan dengan Bromiley *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa *governance* atau tata kelola memberikan pedoman tentang bagaimana manajemen risiko harus dilakukan; baik pada tingkat umum maupun secara khusus dengan jenis sektor ekonomi yang dimiliki oleh semua jenis perusahaan. Tata kelola perusahaan untuk manajemen risiko dipahami sebagai penetapan prinsip, pedoman, kebijakan, strategi, dan praktik yang baik untuk mengelola risiko (OECD, 2014). Selain itu, ini membantu mengendalikan manajemen, karena mengurangi kekhawatiran pemangku kepentingan akan penipuan, kebutuhan akan transparansi yang lebih besar, pengungkapan perusahaan ke pasar, dan peningkatan akuntabilitas dewan direksi (Demidenko & McNutt, 2010) pada Fabio (2019).

Namun hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang diselesaikan oleh Togok (2016) menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara struktur organisasi dalam tata kelola perusahaan dan efektivitas ERM di antara perusahaan publik Malaysia. Temuan ini juga didukung oleh literatur lain yang menemukan bahwa hubungan antara struktur organisasi dalam peningkatan tata kelola perusahaan dan efektivitas manajemen risiko tidak signifikan di antara lembaga keuangan di Thailand (Ranong & Phuenngam, 2009) dalam Sukhri (2019).

Dalam penerapannya di Sekretariat Jenderal DPR, MPR dan DPD RI, *governance* atau tata kelola memang belum sepenuhnya efektif dilaksanakan. Tolak ukur penilaian kinerja organisasi tidak berdasarkan bagus atau tidaknya tata kelola yang telah diterapkan, namun kinerja organisasi dinilai berdasarkan tingkat kepuasan Anggota Dewan dan realisasi anggaran setiap tahunnya. Rendahnya monitoring dan tidak dilaksanakannya prosedur tata kelola dalam rangka pemenuhan kepuasan permintaan Anggota Dewan DPR, MPR, dan DPD RI membuat penerapan ERM dalam pencegahan kecurangan tidak berjalan secara efektif.

**Upaya Pencegahan Kecurangan** Tabel 5 menunjukkan bahwa empat pilar *Enterprise Risk Management* memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan yang berarti bahwa  $H_6$ ,  $H_7$ ,  $H_8$  dan  $H_{10}$  diterima. Governance, strategi, manajemen risiko, dan pelaporan secara signifikan memiliki pengaruh dalam mendeteksi kecurangan di DPR, MPR dan DPD RI. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul "*The effect of enterprise risk management on prevention and detection fraud in Indonesia's local government*" oleh Tarjo (2022) yang menyatakan bahwa komponen Manajemen Risiko Perusahaan menunjukkan signifikansi terhadap deteksi penipuan di pemerintahan daerah.

Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Soetedjo (2018) tentang “Penerapan Coso ERM Integrated Framework Dalam Mendukung Audit Forensik Untuk Menanggulangi Tindakan Kecurangan” yang menyatakan bahwa “Integrasi antara lima komponen pengendalian internal dengan ERM memberikan jaminan bagi manajemen bahwa tujuan organisasi akan tercapai secara efektif dan efisien termasuk mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud*”. Eugenia (2022) menyatakan bahwa COSO ERM 2017 dalam memilih, mengembangkan, dan menerapkan kegiatan kontrol pencegahan dan deteksi, membangun proses pelaporan dan pendekatan terkoordinasi untuk penyelidikan dan tindakan korektif dan memantau risiko penipuan proses manajemen, laporan hasil dan meningkatkan proses pengendalian internal yang kuat akan meminimalisir terjadinya kecurangan (korupsi).

**Tabel 5. Uji Regresi Pendeteksian Kecurangan**

Variabel	Koefisien	t	Sig.	Kesimpulan
Konstanta	-1.899	-.524	.602	
<i>Governance</i>	.849	4.174	.000	H <sub>6</sub> diterima
Strategi	.365	2.314	.024	H <sub>7</sub> diterima
Manajemen risiko	-.494	-2.368	.021	H <sub>8</sub> diterima
Evaluasi	.035	.242	.810	H <sub>9</sub> ditolak
Pelaporan	.314	2.978	.004	H <sub>10</sub> diterima

Sumber: Data Diolah (2022)

Beberapa responden terkait dengan penerapan ERM atas upaya deteksi kecurangan juga menyatakan bahwa:

*“Kematangan manajemen risiko pada sebuah lembaga tidak akan terwujud apabila kegiatan assurance atau pengawasan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan tidak berjalan secara efektif”.*

Responden lain juga mengatakan bahwa:

*“Saat ini APIP di lembaga parlemen sudah mulai dilibatkan dalam kegiatan pendampingan untuk memperbaiki tata kelola manajemen dan penilaian risiko agar unit kerja instansi dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan”.*

Lebih lanjut variabel evaluasi dalam salah satu dari lima pilar ERM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan yaitu memiliki nilai  $t=0.242$  dan nilai probabilitasnya sebesar 0.810 yang berarti bahwa H<sub>9</sub> ditolak. Hasil penelitian tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putera (2022) yang menyatakan bahwa Audit internal merupakan kegiatan evaluasi dalam penerapan ERM sebagai sistem pengendalian internal, memberikan masukan untuk perbaikan dan juga memiliki peran penting dalam mengawasi kegiatan. Kegiatan audit internal dapat mencegah sekaligus mendeteksi

kecurangan. Dalam penelitian Fabio (2019) juga menjelaskan bahwa dengan tidak dilakukan evaluasi, perusahaan tidak dapat mengetahui atau tidak dapat mengidentifikasi bahwa perusahaan akan menimbulkan masalah dengan kurangnya informasi tentang ancaman eksternal dan kelemahan internal organisasi. Dengan demikian, perusahaan besar Kolombia mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko (Mejia, 2017), karena mereka tidak menyadari pentingnya mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, menangani, dan memantau risiko, yang memungkinkan kejadian yang tidak menguntungkan atau memperburuk organisasi.

Dalam kerangka kerja juga COSO mengakui fakta bahwa semua organisasi memerlukan prosedur pengendalian internal formal dan merekomendasikan agar ukuran yang memadai digunakan dalam mengevaluasi apakah tujuan tercapai atau tidak. Kerangka kerja COSO menguraikan empat rekomendasi untuk memitigasi kecurangan yaitu: mempertimbangkan berbagai jenis kecurangan, menilai tekanan, peluang, dan rasionalisasi (*Committee of Sponsoring Organization of the Threadway Commission, 2016*).

Penerapan kegiatan evaluasi dalam manajemen risiko di DPR, MPR dan DPD RI juga belum dilaksanakan secara efektif, hal tersebut terungkap berdasarkan dari keterangan responden yang menyatakan bahwa:

*“Penerapan manajemen risiko saat ini masih dalam sebatas pengumpulan dan pengidentifikasian risiko, belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut atas mitigasi risiko yang telah dilakukan”.*

Responden lain juga menyatakan bahwa:

*“Evaluasi atas penerapan manajemen risiko belum dapat dilakukan karena adanya keterbatasan jumlah personel APIP dalam menjalankan penugasan”.*

Responden lain juga menyatakan bahwa:

*“Penerapan manajemen risiko berupa pengisian risk register, evaluasi mitigasi dan tindak lanjut risiko yang dilakukan unit kerja hanya bersifat formalitas saja dalam memenuhi penilaian dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), belum terbentuk budaya sadar risiko yang memadai untuk dapat menerapkan ERM dalam mendeteksi kecurangan”.*

## **Kesimpulan**

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan lima pilar *Enterprise Risk Management* berdasarkan COSO 2017 yang terdiri dari *governance*, strategi, manajemen risiko, evaluasi dan pelaporan terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan atau *fraud* di lingkup Parlemen Indonesia yaitu DPR, MPR dan DPD RI.

Hasil penelitian berdasarkan pengujian regresi menunjukkan bahwa manajemen risiko, evaluasi dan pelaporan memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan terjadinya

kecurangan. Lebih lanjut hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *governance*, strategi, manajemen risiko dan pelaporan memiliki pengaruh signifikan dalam upaya mendeteksi kecurangan di lingkup Parlemen Indonesia. Pilar-pilar ERM berupa *governance* dan strategi tidak memiliki pengaruh signifikan dalam pencegahan kecurangan sedangkan variabel evaluasi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya mencegah kecurangan.

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa penerapan ERM di lingkup DPR, MPR dan DPD RI memang belum sepenuhnya berjalan efektif, walaupun saat ini lembaga parlemen tersebut masing-masing telah memiliki kebijakan tentang manajemen risiko. Salah satu faktor yang menyebabkan ERM belum sepenuhnya berjalan efektif adalah komitmen pimpinan yang tidak berfokus pada tata kelola manajemen, namun lebih kepada pemenuhan kepuasan layanan kepada anggota dewan DPR, MPR dan DPD RI. Beberapa faktor lain yang menjadi kendala penerapan ERM adalah pemerintah khususnya di lingkup parlemen yaitu masih kurang transparan dalam penyajian informasi sehingga membuat auditor internal mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi, menilai dan mengevaluasi risiko-risiko tersebut. Prosedur atau kebijakan yang sulit dijalankan secara maksimal karena faktor sumber daya manusia dan kompetensi yang terbatas.

Lebih lanjut, kurangnya budaya sadar risiko yang terjadi di dalam manajemen pemerintah juga menjadi salah satu faktor tidak berjalannya ERM dalam menciptakan tata kelola yang baik. Dalam menciptakan budaya sadar risiko peran dan komitmen pimpinan sangatlah diperlukan. Pimpinan harus dapat memberikan contoh yang baik dalam penyelenggaraan transparansi keuangan dan penggunaan anggaran pemerintah. Pimpinan harus dapat berkolaborasi dan memberikan dukungan kepada APIP dalam melakukan kegiatan pengawasan untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel dan berintegritas.

Saat ini tingkat maturitas manajemen risiko yang tertuang dalam hasil penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan oleh BPKP berdasarkan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 di lingkungan parlemen yaitu DPR, MPR dan DPD RI masih dalam level terdefinisi atau level 3 yang berarti masih terdapat kelemahan pada pengendalian internal yang dampaknya cukup material bagi organisasi, oleh karena itu penerapan *Enterprise Risk Management* pada lingkup DPR, MPR dan DPD RI belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan.

## **Daftar Pustaka**

Ahmad, Z. And Taylor, D. (2009) 'Commitment to Independence by Internal Auditors: The



- Effects of Role Ambiguity and Role Conflict', *Managerial Auditing Journal*. Edited By B.J. Cooper, P. Leung, and S. Dellaportas, 24(9), Pp. 899–925. Available At: <https://doi.org/10.1108/02686900910994827>.
- Annamalah, S. *Et Al.* (2018) 'Implementation of Enterprise Risk Management (ERM) Framework in Enhancing Business Performances in Oil and Gas Sector', *Economies*, 6(1). Available At: <https://doi.org/10.3390/Economies6010004>.
- Blanco-Mesa, F. *Et Al.* (2019) 'The Importance of Enterprise Risk Management in Large Companies in Colombia', *Technological and Economic Development of Economy*, 25(4), Pp. 600–633. Available At: <https://doi.org/10.3846/Tede.2019.9380>.
- Governance, B.G.R.C. *Et Al.* (2020) 'COSO ERM 2017 – Kinerja', Pp. 11–13.
- Klamut, E. (2018) 'Internal Audit Tool for Minimizing the Risk of Fraud', *E-Finanse*, 14(1), Pp. 49–68. Available At: <https://doi.org/10.2478/Fiqf-2018-0005>.
- Putra, I. *Et Al.* (2022) 'The Influence of Internal Audit, Risk Management, Whistleblowing System and Big Data Analytics on The Financial Crime Behavior Prevention', *Cogent Economics and Finance*, 10(1), Pp. 1–28. Available At: <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2148363>.
- Shin, I. And Park, S. (2017) 'Integration of Enterprise Risk Management and Management Control System: Based on a Case Study', *Investment Management and Financial Innovations*, 14(1), Pp. 19–26. Available At: [https://doi.org/10.21511/Imfi.14\(1\).2017.02](https://doi.org/10.21511/Imfi.14(1).2017.02).
- Soetedjo, S. and Sugianto, A. (2018) 'Penerapan Coso Erm Integrated Framework Dalam Mendukung Audit Forensik Untuk Menanggulangi Tindakan Kecurangan', *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 2(2), Pp. 262–274. Available At: <https://doi.org/10.30871/Jama.V2i2.944>.
- Tarjo, T. *Et Al.* (2022) 'The Effect Of Enterprise Risk Management On Prevention And Detection Fraud In Indonesia's Local Government', *Cogent Economics And Finance*, 10(1). Available At: <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2101222>.
- Yazid, A.S. *Et Al.* (2018) 'Organizational Factors in Enterprise Risk Management Effectiveness: A Conceptual Framework', *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*, 8(11). Available At: <https://doi.org/10.6007/Ijarbss/V8-I11/5202>.
- Salifou, Daniel A. (2015). 'Analysis of the Effectiveness of Coso ' S Erm Model On Organization Strategy , Competitive Advantage , and Value : A Qualitative Study by Daniel A . Salifou Raj Singh , and Charlotte

- Bertinetti, G. S., Cavezzali, E., & Gardenal, G. (2013). The Effect of the Enterprise Risk Management Implementation on the Firm Value of European Companies. *SSRN Electronic Journal*.
- Pwc. (2017). COSO Enterprise Risk Management–Integrating with Strategy and Performance. Pricewaterhousecoopers
- Linda Miller, Nicole Puri, J.D., RIMS-CRMP-FED, And Joshua Dorries, J.D., MPA. (2019). Leverage What You Have to Integrate ERM And Fraud Risk Management. *Journal Of Government Financial Management*
- Joanne Eugenia Haneda, Yenni Carolina. (2022). COSO ERM and the Role Of Internal Auditors In Fraud Prevention. *Jurnal Akuntansi (Akuntansi Riset)*, 14 (2), 2022, 325-334.
- COSO. (2017). Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance. Committee Of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission.
- COSO, I. I. (2004). Enterprise Risk Management-Integrated Framework. Committee Of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission.
- COSO. (2013, May). Internal Control — Integrated Framework. Committee Of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission.
- ACFE. (2017). Fraud Examiners Manual. In Association of Certified Fraud Examiners. Inc.
- ACFE. (2018). Report to the Nations 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse- Asia Pasific Edition.
- Nguyen, D. K., & Vo, D. (2020). Enterprise Risk Management and Solvency: The Case of The Listed EU Insurers. *Journal Of Business Research*, 133, 360–36.
- Rahman, A. A. A. A., & Al-Dhaimesh, O. H. A. (2018). The Effect of Applying COSO-ERM Model on Reducing Fraudulent Financial Reporting of Commercial Banks in Jordan. *Banks And Bank Systems*, 13(1), 107–115.